

## PELAKSANAAN PENGAWASAN PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Hosnawati

Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura  
e-mail : [ooz\\_jaklaa@yahoo.com](mailto:ooz_jaklaa@yahoo.com)

### ABSTRAK

Jurnal ini diterbitkan dari skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Pegawai pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah mengenai Menetapkan Standar pada Pembiayaan layanan, Kualitas Produk, Kualitas Proses. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Eksternal Pegawai Pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Menetapkan Standar di Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I Pada pembiayaan layanan di Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I belum efektif. Hal ini dikarenakan ketersediaan dana dan fasilitas yang dimiliki sangat minim atau kurang memadai, sementara program-program kerja yang dibuat sangat mempengaruhi dalam tugas pokok dan fungsinya, maka apa-apa yang dilakukannya harus sesuai dengan fasilitas yang ada. Selain itu terdapat kasus pungutan liar yang dilakukan oleh staf operasional penimbangan. Pada kualitas produk Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I masih belum optimal, hal ini dikarenakan beberapa pegawai yang ada adalah pegawai pindahan. Selanjutnya untuk pengawasan kinerja pegawai di bidang operasional melakukan absensi untuk mengukur kinerja pegawainya. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai di bidang operasional secara langsung di lapangan. Selain itu dilakukan penerapan program kerja yang sudah dibuat di awal tahun yang dibagi menjadi 4 (empat), program kerja tersebut yang menjadi tolak ukur dari kinerja UPLLA Wilayah I. Dari kualitas proses di Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I masih dianggap belum optimal, hal tersebut dikarenakan bahwa masih diperlukan pemasangan CCTV di jembatan timbang, sehingga pegawai di lapangan tidak melakukan penyimpangan. Selanjutnya khusus di lapangan Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan memberi teguran kepada petugas yang tidak menaati peraturan. Serta penyuluhan dan pembinaan kepada pegawai di lapangan agar tidak ada permainan antara petugas dengan pemilik kendaraan angkutan barang. Hal ini dilakukan agar pegawai di lapangan dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan aturan kerja.

Kata kunci: Menetapkan Standar, Pembiayaan layanan, Kualitas Produk, Kualitas Proses

### ABSTRACT

The journal is published from the thesis entitled Implementation Monitoring Employee Services Unit Traffic and Transportation, Region I Office of Transportation, Communication and Information Technology of West Kalimantan Province. The problems discussed in this paper is about Setting the Standard in Financing services, Quality Products, Quality Process. The purpose of this study is to describe the implementation of Internal and External Supervision Service Unit Employees In Traffic and Transportation, Region I Office of Transportation, Communication and Information Technology of West Kalimantan Province. The results showed that the process of Setting the Standard in the Service Unit of Traffic and Transportation, Region I care financing in the Service Unit Traffic and Transportation, Region I has not been effective. This is due to the availability of funds and facilities are extremely minimal or inadequate, temporary work programs that are made affect the duties and functions, then nothing should be done in accordance with existing facilities. In addition there are cases of extortion done by weighing the operational staff. On product quality Services Unit Traffic and Transportation Region I is still not optimal, this is because there are some employees who transfer employees. Furthermore, for monitoring the performance of employees in the field of operational confirm their attendance to measure the performance of employees. It aims to prevent and minimize the occurrence of errors made by employees in the field of operations directly in the field. In addition, the implementation of the program of work done that was made in the early years were divided into 4 (four), the work program is to be a benchmark of the performance UPLLA region I. From the quality of the processes in the Service Unit of Traffic and Transportation, Region I is considered not optimal, it is because that still required the installation of CCTV at

weigh stations, so that employees in the field are not contrary. Furthermore, in the field of Traffic Services Unit and Transport to give warning to the officers who do not obey the rules. As well as counseling and guidance to employees on the ground that there is no play between officers with the owner of goods transport vehicle. This is done so that the employees in the field in carrying out supervisory duties in accordance with the rules of work.

Keywords: Setting the Standard, Financing Services, Quality Products, Quality Process.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Pelayanan Sektor Perhubungan di Provinsi Kalimantan Barat meliputi pelayanan bidang darat, laut, dan udara serta pelayanan komunikasi dan informatika mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang berkembangnya sektor perekonomian daerah. Oleh sebab itu maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan aktivitas perhubungan komunikasi dan informatika daerah untuk terus berupaya agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berhubungan langsung dengan masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis. Pelayanan administrasi diberikan dalam bentuk berbagai macam perijinan sesuai dengan wewenangnya sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan berlalu lintas yang aman, selamat, nyaman dan ketersediaan informasi yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan, seperti pelanggaran kelayakan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, pelanggaran perijinan angkutan umum, pelanggaran tata cara berlalu lintas, pelanggaran kelebihan angkutan barang, pelanggaran keselamatan persyaratan pelayaran dan navigasi, pelanggaran persyaratan dan kelaikan kapal sehingga tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, cepat dan lancar, tertib, teratur dan nyaman dapat terwujud. Selain itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, serta pemberian izin dan mengkoordinasikan kegiatan usaha jasa media elektronik, komunikasi dan informasi yang memerlukan pemikiran untuk menggali potensi yang rencana kerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok dinas, maka kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di dukung oleh unsur-unsur organisasi salah satunya adalah Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pos dan telekomunikasi, teknologi informatika, serta sarana komunikasi dan desiminasi informasi. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I
- b. Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah II
- c. Unit Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Dalam melaksanakan tugas teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang urusan lalu lintas dan angkutan darat, dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi melaksanakan penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya, pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Provinsi lintas kabupaten/kota, pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan pelayanan proses administrasi dan teknis rubah bentuk/barang bangun kendaraan bermotor, pelaksanaan pelayanan proses administrasi perpanjangan ijin trayek tetap dan tidak tetap, kartu pengawasan kendaraan angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan, pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan surat ukur, surat tanda pendaftaran, sertifikat kapal, kelaikan kapal, sertifikat pengawasan kapal, surat tanda kebangsaan untuk kapal yang memiliki ukuran dari Gross Ton (GT)7 ke atas, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berhasil tidaknya pencapaian suatu tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas suatu organisasi, atau baik buruknya citra suatu organisasi dalam pandangan masyarakat adalah tanggung jawab pimpinannya. Demikian pula masalah-masalah yang sedang atau yang mungkin akan dihadapi oleh pimpinan dan termasuk bagaimana kualitas orang-orang yang dipimpinya. Setiap pimpinan baik instansi pemerintah maupun swasta memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai pimpinan. Untuk itu seorang pimpinan berkewajiban mengetahui terjadinya masalah penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan, hambatan-hambatan dan kegagalan pencapaian tujuan dan pelaksanaan satuan kerja yang dipimpinya. Selanjutnya pimpinan berkewajiban pula untuk secepat mungkin melakukan langkah-langkah tindak lanjut guna dapat mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan.

Aparatur yang bersih dan berwibawa akan terwujud, bila menempatkan nilai-nilai disiplin sebagai acuan hidupnya. Bersih artinya bahwa Pegawai sebagai pribadi memiliki ketaatan pada aturan yang berlaku dan menjadikan ketaatan tersebut sebagai kebanggaan.

Hosnawati

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Sedangkan berwibawa artinya, bahwa Pegawai sebagai pribadi memiliki kemauan dan kemampuan menjadikan pegawai atau masyarakat yang disiplinnya untuk taat pada aturan yang berlaku, dan mereka akan dihargai oleh masyarakat karena kebersihan dan kepeduliannya untuk menempatkan masyarakat dalam prioritas yang utama. Untuk mengantisipasi tuntutan kebutuhan disiplin Pegawai, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang didalamnya mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi terhadap kewajiban yang tidak ditaati. Namun terlepas dari beberapa kelemahan yang terdapat dalam peraturan tersebut, hingga saat ini masih sangat terasa bahwa masih banyak persoalan yang timbul berkaitan dengan sikap dan perilaku disiplin Pegawai.

Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan kerja dan pelaksanaan tugas yang lainnya terkadang masih diremehkan. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran para pegawai akan tugasnya belum maksimal, sehingga pegawai cenderung lebih mengurus kepentingan pribadi atau kepentingan dari golongannya. Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan atas tugas-tugas pokok pemerintahan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebab tanpa pengawasan yang efektif baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan, atau penyelewengan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Provinsi Kalimantan Barat yaitu pengawasan terhadap pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaan yang diberikan kepadanya agar sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Pengawasan yang dilaksanakan terhadap pegawai pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai, sehingga melalui pengawasan diharapkan akan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugasnya, khusus dilapangan bagi pegawai pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan setiap hari dengan dibagi menjadi 2 shift, shift 1 dilaksanakan dari jam 06.45 s/d jam 16.45, dan shift 2 dilaksanakan dari jam 16.45 s/d jam 06.45. masing-masing shift terdiri dari : Kepala tugas operasional, Petugas pengatur lalu-lintas pada jalur masuk dan keluar, Petugas pengatur pada platform untuk mengatur berhenti atau berjalan, Petugas timbang, Petugas administrasi denda, Pesuruh khusus.

Indikasi permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa lemahnya pengawasan yang dilaksanakan oleh pegawai Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan

Wilayah I Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat, berorientasi pada tidak adanya tindak lanjut berupa sanksi tegas yang diberikan kepada pihak pengemudi kendaraan angkutan barang tersebut mengenai pelanggaran terhadap kelebihan muatan yang diijinkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut dan agar masalah yang diteliti lebih terfokus pada permasalahan yang diteliti, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Eksternal Pegawai Pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. berkenaan dengan waktu penelitian ini dilaksanakan selama  $\pm$  3 bulan setelah usulan penelitian disetujui oleh para dosen penguji dan dosen pembimbing pada saat usulan penelitian telah diseminarkan.

Subjek penelitian adalah Kepala UPLLA Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat, Kasubbag TU, Pit. Kasi Pengawasan, Kasi Penimbangan, Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai instrument pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti harus mengumpulkan data yang valid dan akurat dengan terlibat langsung dengan masyarakat serta untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti juga dilengkapi dengan alat-alat pengumpul data yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam upaya memperoleh data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, aktivitas dalam analisis data terdiri dari 3 tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), memaparkan (*data display*), dan Verifikasi (*verification*). Sedangkan untuk mendapatkan validitasnya menggunakan triangulasi teknik.

## 3. KAJIAN TEORI

Salah satu fungsi manajemen dalam dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen pemerintahan di lingkungan organisasi/unit kerjanya. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan ataupun pelaksanaannya. Untuk itulah fungsi pengawasan perlu dilakukan sedini mungkin agar diperoleh umpan balik untuk melakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum terjadi lebih buruh sehingga sulit diperbaiki.

Nawawi (2005:115) berpendapat kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan/manajer semua unit atau satuan kerja terhadap

pelaksanaan pekerjaan dilingkungannya. Atau dengan kata lain kontrol diartikan sebagai proses mengukur dan menilai tingkat efektivitas kerja personil dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan Lubis (1985:154), mengatakan pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Sementara itu (dalam Winardi, 2006:397) pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yakni:

- a) Mengukur hasil pekerjaan
- b) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan)
- c) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan

Kemudian Handyaningrat (2005:148) menyatakan bahwa pengawasan adalah penilaian atau koreksi atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau jaminan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan.

Menurut Handyaningrat (2005:144) pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan internal  
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data dan informasi ini digunakan pimpinan untuk menilai pelaksanaan pekerjaan dan menilai kebijaksanaan pimpinan. Dengan demikian pimpinan dapat meninjau kembali kebijaksanaan yang telah dikeluarkan dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan eksternal  
Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.
3. Pengawasan preventif  
Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pada pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut :
  - a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerja.
  - b. Membuat manual/pedoman sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e. Menentukan sistem pemeriksaan, koordinasi dan pelaporan.
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap orang yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

#### 4. Pengawasan represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu menurut Kunarjo (2002:250), berpendapat macam pengawasan dapat dibedakan menurut :

1. Subjek yang melakukan pengawasan, yang dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Pengawasan melekat (Waskat), adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisiensi dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Pengawasan fungsional (Wasnal), terdiri dari aparat pengawasan intern pemerintah yang disebut juga aparat pengawasan fungsional pemerintah, meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, Inspektorat Jendral Departemen, aparat pengawasan LPND, Inspektorat Jendral Pembangunan dan aparat pengawasan ekstern pemerintah, meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPK, DPR, MA, dan masyarakat.
  - c. Pengawasan legislative (Wasleg), adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui BPK.
  - d. Pengawasan masyarakat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah. Pengawasan ini sifatnya merupakan maksud pemikiran dan sasaran yang bertujuan untuk perbaikan.

Menurut kunarjo diatas bahwa Pemerintahan Pusat, Desa, BPD dan Badan atau Lembaga khusus yang ditunjuk berperan sangat penting untuk melakukan pengawasan. Melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dituntut untuk mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat apa lagi yang berkaitan dengan uang. Karena uang sangat sensitif untuk dibicarakan. Masyarakat berperan aktif untuk melakukan pengawasan baik disampaikan secara lisan maupun tertulis karena masyarakat sendirilah yang merasakan dari

hasil program Alokasi Dana Desa. Pengawasan bukan hanya dilakukan dengan melihat rincian anggaran dan peraturan yang dibuat tetapi pengawasan juga dapat melihat sejauh mana proses pelaksana itu sedang berlangsung apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau melenceng dari rencana yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut diungkapkan dalam bentuk langkah umum mengenai proses pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh Terry (dalam Winardi, 1986:397) bahwa pengawasan terdiri dari pada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yakni :

1. Mengukur hasil pekerjaan
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan)
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Sementara Koontz, et. al (dalam Hutauruk, 1986:197) menyebutkan proses dasar pengendalian, di manapun penerapannya atau apa saja yang diawasi, meliputi tiga langkah :

1. Menetapkan standar
2. Mengukur prestasi kerja atau standar
3. Memperbaiki dan mengoreksi penyimpangan yang tak dikehendaki dari standar dan perencanaan.

Menurut suwignyo (1995:111) dalam melakukan pengawasan hendaknya petugas harus memperhatikan langkah-langkah dalam proses pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. Menentukan objek pengawasan.
2. Menentukan titik strategis dalam pengawasan yang memungkinkan dapat mengungkapkan deviasi atau penyimpangan secara keseluruhan.
3. Standar-standar, norma-norma, yang akan digunakan dipertegas.
4. Menentukan prosedur, teknis dan metode yang dipergunakan.
5. Penilaian dan penyelenggaraan.
6. Menentukan dari penyimpangan dengan jalan membandingkan antara pelaksanaan dengan standar atau kriteria.
7. Analisa dan penentuan dari sebab-sebab penyimpangan.
8. Kesimpulan akhir dan evaluasi.

Menurut Kadarman (2001:161) yang mengklarifikasikan dari langkah-langkah proses pengawasan itu menjadi:

1. Menetapkan Standar  
Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.
2. Mengukur Kinerja  
Mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya.

3. Memperbaiki Penyimpangan  
Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Adapun fungsi pengawasan yang dilakukan menurut Handyaningrat (2005:154) yaitu :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadinya kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Fungsi pengawasan yang dinyatakan oleh Handyaningrat menunjukkan, bahwa pengawasan sangat menentukan sekali dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan yang dilakukan bukan bermaksud mencari-cari kelemahan orang lain dan langsung menghukumnya, akan tetapi pengawasan yang dilaksanakan untuk membimbing dan mendidik seseorang agar tidak melakukan kesalahan lagi. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka bawahan tidak merasa takut dan enggan untuk mengambil keputusan yang akhirnya akan timbul rasa kurang percaya terhadap dirinya sendiri.

Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh petugas dapat dikatakan efektif dan efisien apabila mempunyai prinsip-prinsip pengawasan. Menurut Handyaningrat (1990:149-150) prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran dan tujuan (manfaat) dalam melaksanakan pekerjaan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pemahaman tentang Pelaksanaan Pengawasan Pegawai pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat masih kurang optimal. Hal ini dilihat dari beberapa indikator salah satunya adalah:

##### 1. Menetapkan Standar

Peningkatan dalam Menetapkan standar merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai hasil-hasil perencanaan yang akan dicapai. Perencanaan itu mempunyai maksud mencapai tujuan, sasaran, target perencanaan, anggaran, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi. Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam fungsi pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang dalam bermuatan adalah Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi

Kalimantan Barat. Dimana fungsi dan peran Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat adalah melakukan penimbangan, pengujian dan penilaian atas kendaraan angkutan barang dalam bermuatan.

Menetapkan standar dalam kondisi organisasi masa kini berorientasi pada pemikiran bahwa persoalan menetapkan standar harus menjadi kepedulian semua pihak dalam organisasi, khususnya pimpinan puncak. Perencanaan menetapkan standar mau tidak mau harus menjadi bagian dari rencana strategik organisasi. Untuk itu pimpinan dalam level tertinggi dalam organisasi harus peka terhadap pergeseran tuntutan eksternal agar kinerja organisasi dapat tercapai. Dengan demikian Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat akan mampu memenuhi tugas yang diemban, manakala organisasi tersebut melaksanakan tugasnya dengan menetapkan standar kerja yang sudah ditentukan.

Terkait dengan masalah Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dapat dikatakan belum optimal, dilihat dari segi menetapkan standarnya. Masih terdapat kekurangan yang menghambat menetapkan standarnya yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang ada di Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO provinsi Kalimantan Barat.

Pentingnya fungsi dan peran Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan penilaian mengenai menetapkan standar yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu maka penilaian menetapkan standar UPLLA Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat ditekankan pada Pembiayaan Layanan, Kualitas Produk dan Kualitas Proses. Adapun hasil penelitian dari menetapkan standar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1.1 Pembiayaan Layanan

Aktivitas dalam pembiayaan layanan oleh Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat untuk menciptakan kinerja yang maksimal, maka diperlukannya pembiayaan layanan, karena kinerja yang maksimal merupakan suatu idealisme yang harus di perjuangkan terus menerus.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat mengenai menetapkan standar pada pembiayaan layanan yaitu sebagai berikut :

*“Dalam menetapkan standar pada pembiayaan layanan kerja disini secara umum dapat dikategorikan*

*masih rendah. Karena dari program-program kerja yang dibuat setiap tahun masih belum memenuhi target, kegiatan yang telah diprogram sebelum awal tahun mengalami beberapa hambatan, hal ini disebabkan karena dalam menetapkan standar dan ketersediaan serapan dana untuk program tersebut sangatlah minim, maka akan berpengaruh pada waktu, jika dana tidak mencukupi maka waktunya pun tidak tercapai, oleh karena itu dalam menetapkan standar dan ketersediaan dana harus sesuai dengan waktu dan program yang sudah disusun. Disamping itu, terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi di bagian operasional penimbangan yaitu adanya pungutan liar oleh staf penimbangan” (wawancara tanggal 14 juni 2014).*

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa kualitas dari program-program kerja sangat mempengaruhi dalam menetapkan standar pada pembiayaan layanan yang ada di UPLLA Wil I. Masih kurangnya ketersediaan dana yang dimiliki UPLLA Wil I. Hal ini terlihat pada program yang sudah disusun belum memenuhi target. Selanjutnya terdapat kasus pungutan liar yang di lakukan oleh staf operasional penimbangan.

Kemudian wawancara dengan Pit. Kasi Pengawasan yaitu sebagai berikut :

*“kalau masalah menetapkan standar kerja pada pembiayaan layanan ,sebenarnya disini kami sudah dibagi dalam beberapa kelompok jadi dalam pelaksanaan pengawasan personil itu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, jadi disini ada 3 (tiga) seksi anggota dan 3 (tiga) seksi kegiatan, pertama untuk penimbangannya, kemudian untuk pengawasannya dan untuk Kasubbag TU nya sebagai uni khusus menangani personil masalah pegawai, jadi masalah pekerjaan disesuaikan dengan masing-masing seksi. Kalau untuk pengawasan sifatnya itu untuk ke penertiban, penegakan aturan. Kalau penimbangan ini lebih ke fasilitas, misalnya kesiapan fasilitas, fasilitas disini masih kurang memadai, jadi masalah standar sebenarnya itu dikembalikan difungsikan kepada masing-masing seksi lagi” (Wawancara tanggal 14 juni 2014).*

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa penghambat dalam menetapkan standar pada pembiayaan layanan adalah ketersediaan fasilitas yang dimiliki sangat minim atau kurang memadai, sementara dari pelaksanaan pengawasan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka apa-apa yang dilakukannya harus sesuai dengan fasilitas yang ada, hal ini dikarenakan fasilitas tersebut sangat mempengaruhi dalam menetapkan standar dari kegiatan yang dilakukan di UPLLA Wil I.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Penimbangan yaitu sebagai berikut :

*“ya kita menugaskan staf/personil kita sesuai dengan kompleksasi yang ada, jadi sesuai dengan pendidikan dia yang berada dibidangnya masing-masing dan kalau kita bertugas itu tidak memihak siapa itu keluarga, orang lain atau siapapun kita disini betul-betul bertindak netral atau optimal, kalau ada pelanggaran*

*tetap kita tindak, kalau tidak ada ya kita lewatkan” (Wawancara tanggal 14 juni 2014).*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan optimal, hal ini dikarenakan staf/personil sudah berada dibidangnya masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk menetapkan standar pada pembiayaan layanan kerja Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari teknis kerja maupun pengalaman yang dimiliki oleh pegawai, sebagian besar masih rendah, terutama pengalaman dan pengetahuan di bidang operasional penimbangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahmi Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang yaitu sebagai berikut :

*“Lambannya petugas Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dalam menindak tegas para supir-supir yang menimbang di jembatan timbang, membuat para supir yang mengangkut melebihi kapasitas dapat lolos dari tindak pelanggaran (Tilang)” (Wawancara tanggal 23 juni 2014).*

Berdasarkan hasil wawancara dapat di ketahui bahwa lambannya petugas dalam menindak tegas para supir-supir yang mengangkut melebihi kapasitas, hal ini dapat mengakibatkan pengemudi kendaraan angkutan barang lolos dari tindak pelanggaran (Tilang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suryanto pengemudi kendaraan angkutan barang yaitu sebagai berikut :

*“Pelaksanaan penindakan pelanggaran kelebihan muatan yang dilakukan oleh petugas adalah dengan diberikan surat peringatan, petugas tersebut tidak langsung melakukan penilangan terhadap pengemudi kendaraan angkutan barang tersebut, sementara prosedurnya apabila melebihi kapasitas maka akan dikenakan sanksi (Tilang)” (Wawancara tanggal 23 juni 2014).*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran kelebihan muatan pihak UPPLA memberikan surat peringatan, dimana pelaksanaan penindakan pelanggaran atas sejumlah informasi yang diterima petugas tersebut tidak langsung melakukan penilangan terhadap pengemudi kendaraan angkutan barang tersebut, sementara prosedurnya apabila melebihi kapasitas maka akan dikenakan sanksi (Tilang). Hal ini disebabkan karena petugas tidak melaksanakan tugas pengawasan penimbangan sesuai dengan prosedur yang sudah ada.

## 1.2 Kualitas Produk

Selanjutnya dalam kualitas produk langkah yang ditempuh oleh Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dalam kualitas produk adalah tingkat pendidikan yang telah

**Hosnawati**

*Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura*

ditempuh oleh pegawai Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat. pendidikan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku dan sikap pegawai, khususnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya. Dibutuhkan adanya kesesuaian antara jenis pekerjaan dengan pendidikan yang ditempuh. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pegawai dalam memahami pekerjaannya dan memudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dapat di uraikan sebagai berikut :

*“Dalam kualitas produk di Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dalam pembinaan kepegawaian atau disiplin kerja pegawai masih belum optimal, pegawai yang bekerja beberapa diantaranya adalah pegawai pindahan dari DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat, jadi kinerja pegawai sedikit terhambat, tetapi untuk pengawasan kinerja pegawai di bidang operasional pihak Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan melakukan absensi untuk mengukur kinerja pegawai” (Wawancara tanggal 14 juni 2014).*

Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan bahwa dalam kualitas produk dapat dikatakan masih belum optimal, hal ini dikarenakan beberapa pegawai yang ada adalah pegawai pindahan. Selanjutnya untuk pengawasan kinerja pegawai di bidang operasional pihak Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I melakukan absensi. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai di bidang operasional secara langsung di lapangan.

Selanjutnya wawancara dengan Plt. Kasi Pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :

*“Kalau untuk kualitas produk ya masih dikatakan cukup efektiflah, karena disini kami melakukan penerapan biasanya kita itu setiap bulannya ada target, jadi disini dalam pertahun itu di bagi dalam 4 (empat) triwulan dan setiap triwulan itu ada target. Jadi target-target itulah yang harus dapat kita capai, untuk kualitas produk itu biasanya dilihat dari program kerja yang sudah dibuat di awal tahun, maka setiap triwulan itu nanti ada namanya target-target yang harus dicapai, apabila target didalam pertriwulan itu tidak tercapai otomatis tolak ukur kinerja kita semakin menurun, tapi kalau misalnya semakin meningkat berarti apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kinerja kita berhasil atau meningkat” (Wawancara tanggal 14 juni 2014).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam kualitas produk dapat dikatakan efektif, hal ini dilihat dari penerapan program kerja yang sudah dibuat di awal tahun dibagi menjadi 4 (empat), program kerja tersebut yang menjadi tolak ukur dari kinerja UPLLA Wilayah I. Sehingga dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penimbangan yaitu sebagai berikut :

*“ya kalau kita melihat dari standarisasi dan melihat kinerja mereka itu dari tindakannya. Sebenarnya kalau orang berfikir banyak tindak banyak hasil hari ini ditilang misalnya 10-20 kendaraan, tapi bukan kerjaan yang bagus, berarti sosialisasi kita terhadap masyarakat itu tidak berjalan. Meski satu hari dapat 1-2 kendaraan yang ditilang lebih bagus, karena mereka sudah mengerti, Cuma operator kendaraannya itu belum paham betul dengan muatan yang harus sesuai dengan JBI nya”* (Wawancara tanggal 14 juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sosialisasi terhadap masyarakat masih belum berjalan, hal ini dikarenakan operator kendaraannya masih belum paham dengan muatan yang harus sesuai dengan JBI nya.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan juga di temukan penyimpangan-penyimpangan norma kedisiplinan kinerja pegawai Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat di bidang operasional yaitu petugas di lapangan tidak selalu ada di tempat yang tersedia dan absensi yang di sediakan oleh Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat tidak efektif dalam meningkatkan kinerja pegawainya, termasuk pengawas lapangan yang di jembatan timbang, serta dalam pembinaan kepegawaian atau disiplin kerja pegawai yang masih belum menerapkan aturan yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan kelancaran tugas dan fungsi di bidang operasional terhambat.

Dari hasil wawancara dengan Fahmi Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang yaitu sebagai berikut :

*“Tindakan petugas dalam melakukan penimbangan tidak terlalu tegas, karena yang mengangkut/kelebihan muatan tidak melebihi 50% atau sebanyak 10 ton s/d 12 ton hanya di berikan surat peringatan, sementara peraturan yang diijinkan hanya 8 ton saja”* (Wawancara tanggal 23 juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa tindakan petugas dalam melakukan penimbangan tidak terlalu tegas, hal ini dikarenakan yang mengangkut/kelebihan muatan tidak melebihi 50% atau sebanyak 10 ton s/d 12 ton hanya di berikan surat peringatan, sementara peraturan yang diijinkan hanya 8 ton saja. Hal ini dapat menyebabkan pengemudi kendaraan angkutan barang tidak menaati peraturan/melanggar aturan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Suryanto Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang yaitu sebagai berikut :

*“Aktivitas petugas dalam pelaksanaan tugas pengawasan masih belum maksimal dan belum menerapkan prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan petugas dalam melakukan penimbangan masih memberikan toleransi dan pemungutan terhadap supir kendaraan angkutan barang yang menimbang di jembatan timbang tersebut”* (Wawancara tanggal 23 juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa Aktivitas petugas dalam pelaksanaan tugas pengawasan masih belum maksimal dan belum menerapkan prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan petugas dalam melakukan penimbangan masih memberikan toleransi dan pemungutan terhadap supir kendaraan angkutan barang yang menimbang di jembatan timbang tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan supir kendaraan angkutan barang tersebut tidak mendapatkan efek jera.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan dengan baik, maka haruslah menetapkan standar dengan kualitas produk yang baik. Dengan demikian, kemampuan pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat mampu melaksanakan kegiatan operasional dengan baik.

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa kualitas produk berperan sekali dalam menunjang kegiatan operasional pegawai Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas program pengawasan dan pembinaan pegawai, dengan demikian kualitas produk dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh organisasi, maka kualitas produk merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi.

### 1.3 Kualitas Prose

Menyikapi kualitas proses oleh UPLLA Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat maka dalam kualitas proses ditekankan pada kinerja pegawainya, hal tersebut dilakukan adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya, selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kinerja pegawainya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut :

*“Salah satu upaya untuk kualitas proses kami mengawasi kinerja pegawai di bidang operasional yaitu dengan menggunakan CCTV di jembatan timbang, sehingga pegawai di lapangan tidak melakukan penyimpangan, pihak Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan juga memberi meja khusus untuk pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan kinerja Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan, sehingga keluhan dari masyarakat tersebut dapat di tindak lanjuti”* (Wawancara tanggal 14 juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I menggunakan CCTV di jembatan timbang untuk mengawasi kinerja pegawainya, hal ini dikarenakan agar pegawai di lapangan tidak melakukan penyimpangan, pihak Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan juga memberi meja khusus untuk pengaduan

dari masyarakat tentang pelayanan kinerja pegawainya, sehingga keluhan dari masyarakat tersebut dapat di tindak lanjuti.

Kemudian wawancara dengan PIt. Kasi Pengawasan yaitu sebagai berikut :

*“Untuk kualitas proses dari kinerja pegawainya, dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan dapat dikategorikan masih rendah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa kendala dengan terbatasnya jumlah personil atau pegawai negeri sipil yang lulusan sarjana hanya 4 orang, sementara minimal harus memiliki 6 orang. Selain itu khusus di lapangan Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan yaitu dengan memberi teguran kepada petugas yang tidak menaati peraturan, tetapi jika ada beberapa yang masih membengkok maka akan di berikan surat teguran untuk teguran pertama, bahwa ketertiban dalam pelaksanaan tugas pengawasan harus di jalankan sesuai dengan aturan kerja pegawai. Selanjutnya memberi penyuluhan dan pembinaan kepada pegawai di lapangan agar tidak ada permainan antara petugas dengan pemilik kendaraan angkutan barang”* (Wawancara tanggal 14 juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan ternyata masih rendah, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai negeri sipil yang lulusan sarjana hanya 4 orang, sementara minimal harus memiliki 6 orang, untuk itulah maka penambahan personil atau petugas yang lulusan sarjana di UPLLA-I sangat perlu, sehingga petugas-petugas dapat diefektifkan. Selanjutnya khusus untuk dilapangan UPLLA memberi teguran kepada petugas yang tidak menaati peraturan dengan diberikan teguran pertama. Selanjutnya untuk dilapangan diberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pegawai agar tidak ada permainan antara petugas dengan pemilik kendaraan angkutan barang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Penimbangan yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :

*“ya kalau kita menghendaki penyimpangan yang ada ya itulah melalui tindakan-tindakan. Kalau pejabat kita yang melakukan penyimpangan itu maka kita tegur sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin kita melalui disiplin pegawai, disiplin pegawai itu ada beberapa tahap, mungkin penundaan naik gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat atau menurunkan pangkatnya lagi, itu sudah fatal, tapi itulah kita melalui proses dulu ya itu dengan memberikan teguran pertama, kedua dan ketiga, itu untuk staf kita”* (Wawancara tanggal 14 juni 2014).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kualitas proses dilakukann dengan tindakan-tindakan dengan memberikan teguran sesuai dengan aturan yang ada. Disiplin pegawai itu ada beberapa tahap, seperti penundaan naik gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat atau menurunkan pangkatnya lagi, hal ini dilakukan melalui proses.

Berdasarkan observasi dengan hasil wawancara beberapa informan di atas, dapat menggambarkan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat kinerja, diantaranya masalah kualitas proses yang dimiliki

**Hosnawati**

*Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura*

UPLLA Wilayah I yang lebih diindikasikan pada pendidikan dan keterampilan yang dimiliki UPLLA Wilayah I. Dikatakan bahwa pendidikan dan keterampilan menjadi faktor pendukung tapi juga faktor penghambat. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia sehingga kinerja masih belum optimal.

Berdasarkan wawancara dengan Fahmi Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang yang dapat diuraikan sebagai berikut :

*“Hambatan dalam melakukan pengawasan sesuai prosedur yang di tetapkan oleh pihak Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pemuatan adalah 8 ton, jika membawa/bermuatan sebanyak 10 ton s/d 11 ton maka akan di berikan peringatan”* (Wawancara tanggal 23 juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan sesuai prosedur yang di tetapkan oleh pihak Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pemuatan adalah 8 ton, jika membawa/bermuatan sebanyak 10 ton s/d 11 ton maka akan di berikan peringatan. Hal ini dapat mengakibatkan pengemudi kendaraan angkutan barang akan mengangkut melebihi kapasitas.

Dari hasil wawancara dengan Suryanto Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang yaitu sebagai berikut :

*“Dalam mengoreksi penyimpangan yang tak dikehendaki dari strandar dan perencanaan tersebut, maka dilakukan pembinaan serta arahan kepada pegawainya, khususnya petugas dilapangan yang dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak maksimal”* (Wawancara tanggal 23 juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, ternyata dalam mengoreksi penyimpangan yang tak dikehendaki dari strandar dan perencanaan tersebut, maka dilakukan pembinaan serta arahan kepada pegawainya, khususnya petugas dilapangan yang dalam melaksanakan tugas pengawasan belum maksimal. Hal ini dilakukan agar petugas tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

## **5. KESIMPULAN dan SARAN**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran bahwa pelaksanaan pengawasan pegawai pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan maksimal, karena terdapat beberapa proses diantaranya :

- a. Pada pembiayaan layanan di Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I belum efektif. Hal ini dikarenakan ketersediaan dana dan fasilitas yang dimiliki sangat minim atau kurang memadai, sementara program-program kerja yang dibuat sangat mempengaruhi dalam tugas pokok dan fungsinya, maka apa-apa yang dilakukannya harus sesuai

dengan fasilitas yang ada. Selain itu terdapat kasus pungutan liar yang di lakukan oleh staf operasional penimbangan.

Bagi instansi terkait di Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat pembiayaan layanan perlu ditingkatkan dan diperhatikan lagi. Agar organisasi dapat berjalan secara maksimal

- b. Pada kualitas produk Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I masih belum optimal, hal ini dikarenakan beberapa pegawai yang ada adalah pegawai pindahan. Selanjutnya untuk pengawasan kinerja pegawai di bidang operasional melakukan absensi untuk mengukur kinerja pegawainya. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai di bidang operasional secara langsung di lapangan. Selain itu dilakukan penerapan program kerja yang sudah dibuat di awal tahun yang dibagi menjadi 4 (empat), program kerja tersebut yang menjadi tolak ukur dari kinerja UPLLA Wilayah I.

Dalam pembinaan kepegawaian atau disiplin kerja pegawai di lingkungan Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat kualitas produk perlu ditingkatkan lagi, penempatan petugas sesuai dengan bidang keahliannya, agar ketertiban dalam pelaksanaan tugas pengawasan dapat di jalankan sesuai dengan aturan kerja kepegawaian, adanya tambahan pegawai yang lulusan sarjana (PNS).

- c. Dari kualitas proses di Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I masih dianggap belum optimal, hal tersebut dikarenakan bahwa masih diperlukan pemasangan CCTV di jembatan timbang, sehingga pegawai di lapangan tidak melakukan penyimpangan. Selanjutnya khusus di lapangan Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan memberi teguran kepada petugas yang tidak menaati peraturan. Serta penyuluhan dan pembinaan kepada pegawai di lapangan agar tidak ada permainan antara petugas dengan pemilik kendaraan angkutan barang. Hal ini dilakukan agar pegawai di lapangan dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan aturan kerja.

Perlu peningkatan kerja para pegawai Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat khususnya di lapangan/bidang operasional penimbangan dalam melaksanakan tugas pengawasan, perlu menindak tegas bagi pengemudi/pengusaha kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan tanpa adanya toleransi, sehingga organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Amirin, Tatang M,1990. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press

**Hosnawati**

*Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura*

Handyaningrat, Soewarno. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.

Kadarman, 2001, *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*, Penerbit : PT Prenhallindo, Jakarta

Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press)

Lubis, Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moleong, lexy.J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rodsakarya.

Nazir, Moh. 1991. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nasution, S.M. 1998. *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta: Ghajah Mada University Press

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Tohardi, A, 2008. *Petunnjuk Praktis Menulis Skripsi*, Bandung: Mandar Maju

Winardi. 2006. *Azas-Azas Manajemen*, Bandung: Alumni.

### Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2006 *tentang pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang* Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang didalamnya mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi terhadap kewajiban yang tidak ditaati.*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 *tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata*

*Kerja Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat.*

*berkualitas, terpadu, memadai dan memberikan kepuasan kepada pengguna jasa Perhubungan di Provinsi Kalimantan Barat.*

Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2005 *tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat.*

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 *tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.*

Surat Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 *tentang Terwujudnya Pelayanan Jasa Sektor Transportasi Pos dan Telekomunikasi yang*

### **Skripsi**

Erlangga, Femil Bogja. 2011. *Pengawasan Terminal Siantan Indah di Kecamatan Pontianak Utara.* Pontianak: Lembaga Penerbit Universitas Tanjungpura

Yunita, Irni. 2012. *Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.* Pontianak: Lembaga Penerbit Universitas Tanjungpura





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HOSNAWATI

NIM / Periode Lulus : E21110007/2014

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : [ooz\\_jaklaa@yahoo.com](mailto:ooz_jaklaa@yahoo.com)/ 081256567771

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui  
Pengelola Jurnal.....

Dibuat di : Pontianak  
Pada : Agustus 2014

Dr. Erdi, M.Si  
NIP. 196707272005011001

( Hosnawati )